

Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Penderita Disabilitas Dalam Program Jebol Anduk di Kota Surabaya

Nizza Kartika Sari¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nizzakartika39@gmail.com

ABSTRAK

Program Jebol Anduk Disdukcapil Surabaya menjadi inovasi krusial dalam memberikan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan adminduk bagi warga rentan, khususnya penderita disabilitas. Dengan fokus pada Desain Program Inklusif, penyesuaian fasilitas fisik dan konsultasi dengan ahli disabilitas menjadi strategi utama. Program ini berhasil menjangkau kelompok rentan melalui layanan jebol anduk, termasuk di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng. Sistem Pemantauan Kinerja yang efektif memastikan evaluasi terhadap keberhasilan program dalam mencapai inklusivitas, sementara Evaluasi Periodik menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dampak pada kesejahteraan penderita disabilitas. Kolaborasi antar instansi menjadi kunci sukses, diukur dari tingkat kerjasama Disdukcapil dengan instansi terkait, menciptakan lingkungan kerja sama yang harmonis. Dengan demikian, Program Jebol Anduk memberikan solusi holistik dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, memastikan keberlanjutan inklusivitas, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat rentan.

Kata Kunci: *Jebol Anduk, Inklusivitas, Pelayanan Adminduk.*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Surabaya merupakan sebuah kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Terletak di pantai utara Jawa, Surabaya ialah pusat ekonomi dan bisnis yang krusial di Indonesia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, terlibat dalam peristiwa krusial selama masa kemerdekaan Indonesia. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya memiliki berbagai fasilitas dan layanan, termasuk pusat perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selain itu, Surabaya juga memiliki daya tarik wisata, seperti Monumen Kapal Selam, Taman Bungkul, dan Masjid Al-Akbar. Sebagai pusat ekonomi, Surabaya memiliki pelabuhan yang krusial, memainkan peran kunci dalam perdagangan dan transportasi di Indonesia.

Di Surabaya, kondisi penderita disabilitas mencerminkan serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks pendidikan, akses terbatas terhadap fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi salah satu kendala utama. Beberapa sekolah mungkin belum sepenuhnya memadai dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang ramah disabilitas. Kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan tenaga pendidik terkait kebutuhan khusus penderita disabilitas dapat menjadi hambatan tambahan dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif.

Selain pendidikan, penderita disabilitas di Surabaya juga mungkin menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dalam aspek kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan dukungan rehabilitasi mungkin belum optimal. Sosial stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan potensi penderita disabilitas juga dapat membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi kebijakan pemerintah guna mengatasi hambatan ini dan meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi penuh penderita disabilitas di berbagai aspek kehidupan di Surabaya.

Dari beberapa permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, Disdukcapil Kota Surabaya mengambil langkah-langkah inovatif sebagai upaya penyelesaiannya. Tindakan ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang menetapkan kewajiban negara guna memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara guna memenuhi hak dan kewajiban mereka. Sebagai langkah konkret guna mewujudkan prinsip tersebut, Pemerintah Kota Surabaya, khususnya melalui Disdukcapil, telah melaksanakan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Ini bertujuan guna mengoptimalkan keteraturan administrasi penduduk Surabaya melalui PROGRAM JEBOL ANDUK. Dalam program ini, tanggung jawab diberikan kepada RT dan RW setempat, bertujuan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas mewajibkan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya guna menjalani kehidupan yang maju, adil, dan bermartabat. Beberapa hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang harus dipenuhi mencakup hak terhadap pekerjaan, kewirausahaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diharapkan dengan implementasi undang-undang ini, penyandang disabilitas dapat memiliki peluang guna mengembangkan karir, ditempatkan dalam pekerjaan dengan adil dan seimbang, berwirausaha secara mandiri, mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta dapat menyalurkan aspirasi politik dan terlibat dalam organisasi.

Dari UU No 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, dihasilkan beberapa peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu contohnya ialah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atau dapat pula disebut Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Guna memenuhi ketentuan UU dan Perda tersebut, pemerintah perlu mengatur barang dan jasa yang dihasilkan, karena hal ini sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat. Upaya pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan dari masing-masing instansi pemerintah (OPD), yang dijalankan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Menurut Lestari, Sumarto, & Isdaryanto (2017), beberapa permasalahan melibatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan tempat rekreasi. Kedudukan mereka di masyarakat juga seringkali tidak setara. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas di bidang sosial dan politik masih sangat terbatas (Setyaningsih & Gutama, 2016). Hal ini disebabkan karena program dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kadang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan menjadi suatu kebutuhan guna menyelaraskan program dan anggaran dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.

Sehingga pemerintah kota Surabaya membuat sebuah program inovasi baru yang mengikutsertakan penyandang disabilitas, Program Jebol Anduk yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya ialah inisiatif pelayanan adminduk yang dirancang guna memastikan aksesibilitas dan pelayanan yang inklusif bagi warga rentan, terutama mereka yang terkendala guna mendatangi tempat pelayanan. Adminduk, sebagai dasar dari berbagai pelayanan, melibatkan proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang mencakup penerbitan dokumen identitas seperti KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini khususnya memperhatikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar, dan komunitas adat. Warga yang membutuhkan layanan Jebol Anduk dapat mengajukan permintaan ke Kelurahan/Kecamatan atau langsung ke kantor Disdukcapil di Siola. Tim Jebol Anduk kemudian akan dikirim ke lokasi yang diminta guna memberikan pelayanan adminduk. Program Jebol Anduk tidak hanya terfokus pada institusi pendidikan, tetapi juga mengadakan layanan

di sektor lain seperti UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Surabaya, seperti rutan Medaeng dan lapas Porong. Melalui program ini, Disdukcapil berharap dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, sambil tetap memberikan fasilitas layanan adminduk secara gratis.

Namun, dalam melaksanakan analisis kebijakan terkait penyertaan penderita disabilitas dalam program Jebol Anduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kerangka hukum dan pedoman yang menjadi dasar implementasi program tersebut. Pertama-tama, harus diidentifikasi kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan landasan hukum bagi keberlanjutan hak dan partisipasi penderita disabilitas. Keterkaitan antara ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan program Jebol Anduk harus dianalisis, termasuk bagaimana poin-poin spesifik dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam konteks program tersebut.

Selain itu, evaluasi terhadap peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan penyandang disabilitas perlu dilakukan. Peraturan daerah ini dapat memberikan panduan lebih spesifik mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah setempat dalam menyelenggarakan program inklusif seperti Jebol Anduk. Sejauh mana peraturan daerah tersebut memberikan landasan bagi partisipasi penderita disabilitas dalam program dan apakah ada upaya khusus guna menjamin inklusivitas perlu dianalisis secara seksama. Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian terhadap bagaimana kerangka pedoman dan prosedur implementasi program telah dijabarkan dan diintegrasikan. Apakah pedoman ini mencakup langkah-langkah konkret guna memastikan partisipasi penuh dan setara penderita disabilitas? Evaluasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti desain program, metode identifikasi penderita disabilitas, dan langkah-langkah yang diambil guna menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas.

Dengan melakukan analisis kebijakan secara menyeluruh, dapat dipahami sejauh mana kerangka hukum dan pedoman yang ada mendukung penyertaan penderita disabilitas dalam program Jebol Anduk. Analisis ini menjadi dasar guna menentukan apakah diperlukan perubahan atau peningkatan dalam regulasi dan panduan yang ada guna memastikan keberhasilan implementasi program inklusif di tingkat lokal.

Dalam Desain Program Inklusif program Jebol Anduk di Surabaya, langkah-langkah signifikan telah diambil guna memastikan aksesibilitas penuh bagi penderita disabilitas. Pertama-tama, penyesuaian fasilitas fisik dan layanan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Ini mencakup peninjauan dan modifikasi terhadap infrastruktur fisik, seperti pembangunan akses ramp, lift, dan fasilitas toilet yang ramah disabilitas. Tujuan dari penyesuaian ini ialah guna memberikan lingkungan yang dapat diakses dengan mudah dan nyaman bagi mereka dengan kebutuhan khusus.

Selanjutnya, program ini menunjukkan komitmen guna memastikan bahwa desainnya mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas dengan melibatkan konsultasi dengan ahli disabilitas. Dalam hal ini, kemungkinan adanya keterlibatan kelompok advokasi disabilitas atau individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penderita disabilitas. Konsultasi ini dapat mencakup diskusi terkait desain aplikasi, antarmuka pengguna, serta proses pendaftaran dan pelayanan secara keseluruhan. Dengan demikian, desain program ini dapat menggambarkan kepekaan terhadap keberagaman kebutuhan penderita disabilitas, menciptakan pengalaman yang inklusif dan setara bagi seluruh pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui penyesuaian fasilitas dan konsultasi dengan ahli disabilitas, Desain Program Inklusif program Jebol Anduk di Surabaya memberikan contoh bagaimana upaya konkret dapat diimplementasikan guna memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan dapat diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.

Dalam konteks Program Jebol Anduk di Surabaya, Monitoring dan Evaluasi (M&E) menjadi bagian integral dari upaya pemerintah guna menilai dan meningkatkan kinerja program dalam mencapai inklusivitas. Pertama-tama, sistem pemantauan kinerja dirancang guna meninjau sejauh mana program Jebol Anduk berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan inklusif kepada warga rentan, khususnya penderita disabilitas. Sistem ini melibatkan pengukuran berbagai indikator kinerja, seperti jumlah layanan yang disediakan, tingkat kepuasan pengguna, dan efektivitas penyesuaian fasilitas fisik.

Evaluasi periodik menjadi langkah kritis guna mengidentifikasi dampak program secara keseluruhan terhadap kesejahteraan penderita disabilitas. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul, termasuk feedback dari pengguna, partisipasi kelompok disabilitas, serta tinjauan terhadap dampak positif yang mungkin telah dihasilkan. Evaluasi berkala memungkinkan pemerintah guna mengevaluasi keberlanjutan program, menyesuaikan strategi yang mungkin perlu diperbarui, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Selain itu, evaluasi periodik juga dapat memperhitungkan perkembangan dalam mencapai inklusivitas, termasuk sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi penderita disabilitas. Hasil evaluasi ini dapat digunakan guna memandu pengambilan keputusan lebih lanjut, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa program terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan adanya sistem pemantauan kinerja dan evaluasi periodik, Program Jebol Anduk di Surabaya menggambarkan komitmen pemerintah guna memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan tidak hanya diakses secara inklusif tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari penderita disabilitas di tingkat lokal.

Koordinasi antar instansi menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan Program Jebol Anduk di Surabaya. Evaluasi dilakukan guna menilai tingkat kerjasama dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan instansi lain yang terlibat dalam mendukung implementasi program ini. Kolaborasi yang efektif dengan instansi terkait, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan, dan lembaga pendidikan, menjadi fondasi utama guna mencapai tujuan inklusivitas program.

Langkah pertama dalam meningkatkan koordinasi ialah memastikan adanya komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara Disdukcapil dan instansi lainnya. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pertemuan rutin, dan penyelarasan tujuan bersama. Kolaborasi yang baik memungkinkan berbagai pihak guna saling memahami peran masing-masing dan berkontribusi secara sinergis dalam mendukung warga rentan, terutama penderita disabilitas.

Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap keberlanjutan program dan dukungan dari instansi terkait. Koordinasi yang efektif dapat tercermin dalam upaya bersama guna menangani tantangan dan perubahan yang mungkin timbul selama implementasi. Keberhasilan Program Jebol Anduk tidak hanya tergantung pada komitmen Disdukcapil, tetapi juga pada sejauh mana koordinasi dengan instansi lain dapat menciptakan lingkungan kerja sama yang harmonis.

Melalui kolaborasi yang kokoh, Program Jebol Anduk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh instansi terkait, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas dampak positifnya pada penderita disabilitas. Sehingga, evaluasi koordinasi antar instansi menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa program ini terus berjalan dengan efektif, mampu menjangkau lebih banyak warga rentan, dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas secara keseluruhan.

Implementasi pemerintah dalam mengikutsertakan penderita disabilitas pada program Jebol Anduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menunjukkan langkah-langkah konkret guna mencapai tujuan inklusivitas yang diinginkan. Penyesuaian fasilitas fisik dan layanan, termasuk infrastruktur yang ramah disabilitas, menciptakan lingkungan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua warga, menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas. Selain itu, konsultasi dengan ahli disabilitas memberikan bukti bahwa desain program mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas, memastikan bahwa layanan yang disediakan relevan dan mendukung kebutuhan khusus mereka.

Program Jebol Anduk juga telah mencapai inklusivitas dengan menyediakan layanan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan warga rentan, seperti sekolah dan institusi pendidikan khusus. Melalui upaya ini, program dapat mencapai dan memberikan pelayanan langsung kepada penderita disabilitas, meminimalkan hambatan yang mungkin dihadapi mereka dalam mengakses administrasi kependudukan. Tanggapan positif dari pihak sekolah, kelurahan, dan Lurah Airlangga menunjukkan keberhasilan program dalam memberikan solusi yang efektif dan merespons kebutuhan masyarakat dengan sensitivitas terhadap kondisi fisik atau keterbatasan.

Dengan demikian, implementasi program Jebol Anduk di Surabaya mencapai tujuan inklusivitas yang diinginkan dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan penderita disabilitas. Dukungan lintas instansi dan evaluasi terhadap penyesuaian fasilitas, konsultasi dengan ahli

disabilitas, serta pelayanan di lokasi yang tepat, semuanya menyumbang pada pencapaian inklusivitas penuh dalam administrasi kependudukan.

SIMPULAN

Program Jebol Anduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menandai langkah signifikan dalam menjawab tantangan inklusivitas pelayanan adminduk, khususnya bagi warga rentan seperti penderita disabilitas. Evaluasi implementasi program mengungkapkan keberhasilan dalam memastikan aksesibilitas penuh dan pelayanan inklusif bagi kelompok yang membutuhkan. Penyesuaian fasilitas fisik dan layanan merupakan fondasi kuat dari upaya ini, dengan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti akses ramp, lift, dan fasilitas toilet yang memadai. Desain Program Inklusif yang memperhitungkan berbagai jenis disabilitas melalui konsultasi dengan ahli disabilitas telah membawa dampak positif dalam menciptakan pengalaman yang setara dan nyaman bagi seluruh pengguna, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sejalan dengan tujuan inklusivitas, layanan Jebol Anduk telah meraih kesuksesan yang signifikan dengan menyediakan pelayanan di lokasi strategis seperti sekolah umum dan institusi pendidikan khusus. Hal ini bukan hanya meminimalkan hambatan fisik yang dihadapi oleh penderita disabilitas dalam mengakses pelayanan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas program. Respon positif dari berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, kelurahan, dan masyarakat setempat, menandakan bahwa Program Jebol Anduk telah berhasil merespon kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Lurah Airlangga, Evi Andriani, memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini dan menyatakan harapannya agar pelayanan semacam ini dapat diperluas ke kelurahan-kelurahan lainnya. Ini menunjukkan tingginya tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program yang dirancang guna mengakomodasi kebutuhan penderita disabilitas. Namun demikian, krusial guna terus memantau dan mengevaluasi implementasi program secara berkala. Evaluasi ini bukan hanya sebatas mengukur efisiensi layanan dan tingkat partisipasi, tetapi juga menilai dampak nyata program terhadap kesejahteraan dan kemandirian penderita disabilitas. Peningkatan evaluasi berkala menjadi suatu kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa program ini tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas Program Jebol Anduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sejumlah saran strategis dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan penguatan dalam proses evaluasi berkala agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak program terhadap kesejahteraan dan kemandirian penderita disabilitas. Evaluasi ini harus melibatkan penderita disabilitas secara langsung dan menggunakan indikator kinerja yang lebih spesifik, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih holistik.

Selanjutnya, perluasan cakupan wilayah menjadi prioritas. Meskipun program ini telah berhasil diimplementasikan di beberapa lokasi, perluasan ke wilayah-wilayah lain di Surabaya dapat memastikan bahwa lebih banyak warga rentan dapat menikmati manfaat layanan Jebol Anduk. Pemetaan kebutuhan lokal dan partisipasi aktif kelurahan dalam perencanaan ekspansi wilayah akan membantu program ini menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Integrasi teknologi dalam layanan adminduk juga merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan aplikasi seluler, portal online, atau solusi teknologi lainnya dapat mempermudah akses bagi penderita disabilitas, sekaligus meningkatkan efisiensi proses administrasi secara keseluruhan. Namun, perlu diberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada penderita disabilitas guna memastikan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan dengan optimal.

REFERENSI

- Dadang, Solihin. *Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi, dan Upaya*. Vol. 1. No. 1. Yayasan Empat Sembilan, 2013.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Averoes, M. F. A., & Rianto, P. (2022). Model Layanan PPID Bawaslu dalam Menjamin Hak Penyandang Disabilitas Mengakses Informasi Publik. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(1).

- Fadhilah, N. A., Putra, P., Rahmawati, R., & Basri, H. (2021). Optimalisasi Umkm Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Di masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. *Devosi*, 2(2), 26-30.
- Lainsamputty, N., & Picauly, B. C. (2021). Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli. *Bacarita Law Journal*, 2(1), 46-53.
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2022). EFEKTIVITAS PKH BIDANG PENDIDIKAN DALAM PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK KPM DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 137-146.
- Syaifurrohman, S., & Nasution, F. A. (2021). Optimalisasi Pendidikan Politik melalui Literasi Digital bagi Penyandang Disabilitas dalam Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 68-78.
- Syaputri, M. D., & Hariyadi, Y. S. (2020). Optimalisasi Program Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Usia Lanjut Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 85-89.